



**LAPORAN BADAN LEGISLASI
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2020-2024
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Tanggal 17 Desember 2019

Disampaikan oleh: ~~Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.~~
Ketua Badan Legislasi, A. 128

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;

**Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat waláfiat.

Selanjutnya perkenankan saya selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM serta DPD RI atas penyusunan dan pembahasan Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi, yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Legislasi. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 telah dimulai sejak Badan Legislasi terbentuk pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan mengirimkan surat kepada komisi dan fraksi untuk meminta usulan RUU yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2020. Selain meminta usulan kepada Komisi dan Fraksi, Badan Legislasi juga menerima usulan RUU yang diajukan oleh Anggota DPR RI dan masyarakat.

Usulan RUU dari masyarakat disampaikan secara tertulis maupun dalam bentuk audiensi dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Adapun beberapa kelompok masyarakat yang telah menyampaikan usulan RUU antara lain dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Koalisi Kebebasan Berserikat, Dewan Pengawas TVRI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pokja Identitas Hukum, International Criminal Justice Reform (ICJR), Komnas Perempuan, Jala PRT, Filantropi Indonesia, Imparsial, Forum Zakat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi, Serikat Pekerja Pos Indonesia, dll.

Pada tanggal 5 Desember 2019, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI untuk membicarakan usulan RUU yang akan menjadi Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas

Tahun 2020 oleh masing-masing lembaga sekaligus pembentukan Panitia Kerja.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, telah dibahas secara intensif oleh PANJA dalam Rapat PANJA Badan Legislasi pada tanggal 4 dan 5 Desember 2019 di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI.

Untuk menjangkau aspirasi masyarakat terkait kebutuhan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 88 ayat (1), Badan Legislasi mengumpulkan dan mengakomodasi pandangan dan pendapat masyarakat di daerah dengan mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan masukan dan pertimbangan yang ada, PANJA telah mendiskusikan secara mendalam dan intensif Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. Pendapat/pandangan yang mengemuka dalam Rapat/PANJA terkait dengan:

- a. evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019;
- b. RUU yang diusulkan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD untuk menjadi Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020;
- c. RUU yang menjadi *carry over*; dan
- d. jumlah RUU yang diusulkan serta berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

Selanjutnya pada Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 5 Desember 2019 yang juga dihadiri Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dapat kami laporkan bahwa berdasarkan pendapat mini akhir fraksi yang disampaikan juru

bicara masing-masing fraksi, serta pendapat Pemerintah, menyetujui untuk melanjutkan hasil pembahasan Penyusunan Prolegnas untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Hal-hal yang disepakati dalam Rapat Kerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU sebagaimana terlampir;
2. 4 (empat) RUU *Carry Over* dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) RUU usulan Pemerintah yaitu: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan; dan
 - b. 1 (satu) RUU usul DPR yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. 3 (tiga) RUU masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka yaitu:
 - a. RUU tentang Perkoperasian;
 - b. RUU tentang Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
4. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) RUU;
Dengan catatan:
 - a. RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2020 dan masuk long list atas usulan dari Menteri Keuangan;
 - b. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi Prioritas usulan dari Komisi XI DPR RI;
 - c. RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari Prioritas RUU Tahun 2020 dan menjadi *long list* atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - d. RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka; dan
 - e. Pembahasan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah melibatkan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun daftar RUU sebagaimana sudah disampaikan kepada Bapak Ibu Anggota Sekalian.

Hasil penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, telah kami sampaikan kepada Pimpinan DPR untuk segera diagendakan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Keputusan Rapat Bamus tanggal 16 Desember 2019 menyetujui untuk mengagendakan penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, sedangkan untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 penetapannya ditunda pada Masa Persidangan II TS 2019-2020 berdasarkan masukan/pandangan beberapa Fraksi.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikianlah Laporan hasil pembahasan penyusunan Prolegnas untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan Prolegnas.

Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi, Anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, dan Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan penyusunan Prolegnas ini dalam suasana yang penuh demokratis. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Tenaga Ahli, Perancang UU, Peneliti, dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan dukungan secara maksimal.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 17 Desember 2019
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
KETUA,
ttd

DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH.,MH.

A-128

Ibnu Multazam